



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 45-55

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Masalah Kebijakan Kesehatan

Nurhayati<sup>1✉</sup>, Nurhayati Telaumbanua<sup>2</sup>, Linda Jernih Hati Daeli<sup>3</sup>, Dini Agustin<sup>4</sup>,

Sheika Sarah Khairunisa<sup>5</sup>, Julian Aulia<sup>6</sup>, Naila Syifaurreidha<sup>7</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [nurhayati1672@uinsu.ac.id](mailto:nurhayati1672@uinsu.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum, norma, dan dinamika yang mempengaruhi kebijakan kesehatan serta memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya. Kebijakan kesehatan melibatkan serangkaian keputusan, perencanaan, dan tindakan yang kompleks dengan berbagai aktor serta konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berperan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis dokumen sebagai sumber data utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kesehatan sangat bergantung pada kerja sama antar aktor, penyesuaian kebijakan dengan konteks lokal, serta penerapan prinsip berbasis bukti. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, etika, dan sosial guna menciptakan kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : *Aktor Kebijakan, Dinamika Kebijakan, Kebijakan Kesehatan, Metode Normatif, Regulasi Kesehatan*

## Abstract

This study aims to examine the legal basis, norms, and dynamics that influence health policy and provide suggestions to improve effectiveness and equity in its implementation. Health policy involves a complex set of decisions, plans, and actions with various actors and social, political, and economic contexts at play. The method used is normative research with a literature study approach and document analysis as the main data source. The research findings show that the success of health policy is highly dependent on cooperation between actors, policy adjustments to the local context, and the application of evidence-based principles. Therefore, a holistic approach that integrates legal, ethical, and social aspects is needed to create policies that are fair, sustainable, and responsive to community needs.

Keyword: *Policy Actors, Policy Dynamics, Health Policy, Normative Method, Health Regulation*

## PENDAHULUAN

Kebijakan kesehatan merupakan rangkaian keputusan, perencanaan, dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu dalam masyarakat. Sektor kesehatan memiliki karakteristik yang sangat kompleks dan unik karena menyangkut kepentingan banyak individu serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan menjadi bagian penting dari kebijakan publik yang harus dirumuskan dan dilaksanakan secara menyeluruh agar dapat mengatasi berbagai persoalan kesehatan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan kebijakan kesehatan, terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan, yakni aktor, konteks, konten, dan proses. Aktor meliputi individu, kelompok, maupun organisasi yang memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan. Peran dan pengaruh aktor sangat ditentukan oleh posisi mereka dalam struktur kekuasaan serta sumber daya yang mereka miliki. Konteks kebijakan mencakup faktor-faktor politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk latar belakang kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Proses kebijakan meliputi rangkaian tahapan mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi hasilnya, sementara konten kebijakan mencakup substansi dan isi kebijakan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara spesifik (Schell et al., 2013).

Jenis kebijakan kesehatan dapat dibedakan berdasarkan fokus dan tujuan, seperti kebijakan kesehatan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara luas, kebijakan pengendalian penyakit, kebijakan kesehatan reproduksi, dan kebijakan kesehatan lingkungan. Selain itu, kebijakan juga dibagi berdasarkan tingkat implementasinya, yaitu kebijakan nasional, regional, dan lokal, yang masing-masing disusun untuk menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Agar kebijakan kesehatan

berjalan efektif, diperlukan kolaborasi yang erat antara berbagai aktor, baik dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, maupun organisasi internasional.

Namun, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan antar aktor, keterbatasan sumber daya, serta dinamika politik dan sosial yang berubah-ubah. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan adaptif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya relevan tetapi juga mampu menanggapi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada kajian teori, konsep, dan regulasi yang mengatur kebijakan kesehatan. Metode normatif dipilih untuk menganalisis aspek hukum, prinsip, serta norma-norma yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum tertulis, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, literatur akademis, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah dan lembaga terkait dengan kebijakan kesehatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen, dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan secara kritis terhadap isi dan substansi kebijakan serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum dan norma yang berlaku. Dalam analisisnya, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif normatif dengan membandingkan teori-teori kebijakan kesehatan dan regulasi yang ada, mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan praktik, serta menilai efektivitas kebijakan berdasarkan kerangka hukum dan etika. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dasar hukum dan norma-norma yang mengatur kebijakan kesehatan serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan masyarakat luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan kesehatan dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan atau keputusan yang memengaruhi cara kerja institusi, organisasi, layanan kesehatan, dan pengaturan pembiayaan dalam sistem kesehatan. Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam sistem kesehatan itu sendiri, karena mencakup elemen-elemen seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, manajemen, fasilitas penunjang, serta layanan kesehatan yang diberikan. Tujuan utama dari kebijakan kesehatan adalah untuk merancang program-program yang

dapat diimplementasikan di tingkat nasional maupun lokal agar mampu mengubah faktor-faktor yang menentukan status kesehatan masyarakat, seperti kondisi lingkungan, perilaku, dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas (Massie, 2009).

Kebijakan ini juga memperhatikan kebutuhan para pengguna layanan kesehatan, termasuk para tenaga medis dan pengelola sistem kesehatan. Dalam praktiknya, kebijakan kesehatan terbentuk melalui rangkaian keputusan yang saling berkaitan dan secara langsung berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan ini melibatkan berbagai pihak. Meski pelayanan kesehatan sering dijalankan oleh sektor swasta atau melalui skema kemitraan, perumusannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah karena menyangkut kepentingan publik dan dipengaruhi oleh faktor politik. Dengan demikian, kebijakan kesehatan merupakan bagian dari kebijakan publik, yang pelaksanaan dan pengaturannya berada dalam tanggung jawab instansi pemerintah seperti Departemen atau Kementerian Kesehatan.

Tujuan dari kebijakan kesehatan mencakup pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, penyembuhan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Selain itu, kebijakan ini juga memperhatikan dampak lingkungan dan kondisi sosial ekonomi terhadap derajat kesehatan masyarakat. Namun, sering kali masyarakat hanya memandang kebijakan kesehatan dari sisi isinya saja, seperti mengenai pendanaan dari pemerintah dan swasta, atau fokus terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Padahal, kebijakan kesehatan memiliki cakupan yang jauh lebih luas karena menyentuh proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi terhadap sistem kesehatan secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Massie, 2009).

Isu-isu kebijakan terbagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkatannya dalam sistem pemerintahan dan ruang lingkup pengaruhnya. Klasifikasi ini penting untuk memahami bagaimana suatu isu berkembang dalam proses perumusan hingga implementasi kebijakan, serta bagaimana aktor-aktor kebijakan di berbagai level terlibat di dalamnya.

Isu-isu utama atau major issues merupakan isu yang biasanya muncul di tingkat pemerintahan tertinggi, seperti presiden, menteri, atau lembaga negara strategis. Isu-isu ini menyangkut arah besar dan misi dari lembaga pemerintah, serta keputusan-keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat atau negara secara keseluruhan. Contohnya seperti penetapan visi nasional pembangunan kesehatan, strategi penanggulangan pandemi, atau reformasi sistem jaminan kesehatan nasional. Karena sifatnya strategis, isu-isu ini sering menjadi perhatian publik dan media, serta memerlukan pertimbangan politik, ekonomi, dan sosial yang mendalam.

Isu-isu sekunder berada di level instansi pelaksana atau kementerian teknis yang bertugas menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat. Isu-isu ini sering kali berkaitan dengan penentuan prioritas program, alokasi sumber daya, dan identifikasi kelompok sasaran yang akan menerima manfaat dari kebijakan. Contohnya termasuk penentuan target imunisasi di daerah tertentu, distribusi alat kesehatan ke puskesmas terpencil, atau strategi pengelolaan gizi buruk pada anak-anak. Isu ini penting karena menjadi jembatan antara kebijakan makro dan pelaksanaan konkret di lapangan.

Sementara itu, isu-isu fungsional merupakan isu yang lebih teknis dan berada di antara level program dan proyek. Isu ini berkaitan dengan pertanyaan seputar manajemen anggaran, kebutuhan pembiayaan, serta strategi penggalangan dana. Di sinilah aspek efisiensi dan efektivitas sangat penting, karena pemborosan anggaran atau kesalahan dalam alokasi dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya, keterlambatan pencairan dana untuk program kesehatan ibu hamil di daerah dapat mengganggu layanan yang seharusnya diberikan secara berkelanjutan.

Yang terakhir adalah isu-isu minor, yaitu isu-isu teknis yang sering muncul pada tingkat pelaksanaan proyek-proyek spesifik di lapangan. Meskipun dianggap kecil, isu ini tetap berpengaruh terhadap kelancaran implementasi kebijakan. Contohnya meliputi pengaturan waktu kerja tenaga kesehatan, kebijakan cuti, tunjangan, pembagian tugas, hingga kepatuhan terhadap pedoman teknis pelaksanaan program. Jika tidak ditangani dengan baik, isu-isu minor ini bisa menumpuk dan berdampak pada rendahnya kinerja lapangan atau kualitas pelayanan kesehatan (Suprpto et al, 2023).

Masalah dalam kebijakan publik memiliki karakteristik yang kompleks dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik di sekitarnya. Salah satu ciri utama dari masalah kebijakan adalah sifatnya yang saling bergantung atau interdependen. Artinya, suatu kebijakan dalam satu sektor, misalnya energi, bisa saja menimbulkan dampak atau turut memengaruhi sektor lain seperti kesehatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa masalah kebijakan bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem yang saling terhubung. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat holistik dan menyeluruh, sebab memecahkan satu masalah secara terpisah dapat mengabaikan dampak atau keterkaitan dengan masalah lain (Kharisma, 2018).

Karakteristik berikutnya adalah subjektivitas. Masalah kebijakan sering kali tidak muncul secara objektif, melainkan ditafsirkan dan dikonstruksi secara selektif oleh para aktor kebijakan berdasarkan sudut pandang, nilai, dan kepentingan masing-masing. Misalnya, pencemaran udara secara ilmiah dapat diukur melalui data konsentrasi polutan. Namun, data ini bisa dimaknai berbeda: ada yang melihatnya sebagai isu lingkungan, ada yang

menekankan aspek kesehatan, atau bahkan melihatnya dari sisi dampaknya terhadap iklim. Artinya, situasi problematis bisa diidentifikasi secara berbeda oleh tiap pihak, dan tidak semua pihak akan sepakat bahwa itu merupakan “masalah” yang sama.

Selain itu, masalah kebijakan juga bersifat artifisial. Ini berarti bahwa suatu situasi dapat dianggap sebagai masalah kebijakan hanya ketika ada keinginan atau kebutuhan untuk mengubah keadaan tersebut. Dengan kata lain, masalah kebijakan tidak selalu hadir secara alami, tetapi bisa “diciptakan” atau dikonstruksi berdasarkan tujuan tertentu, seperti perubahan sosial atau tekanan politik.

Masalah kebijakan juga bersifat dinamis, di mana keadaan dan tantangan yang dihadapi selalu berubah seiring waktu. Ketika satu masalah berhasil diselesaikan, tidak jarang justru muncul masalah baru sebagai konsekuensi dari solusi tersebut. Ini menunjukkan bahwa proses kebijakan adalah proses yang berkesinambungan, membutuhkan adaptasi dan responsivitas yang tinggi dari para pembuat kebijakan.

Karakteristik terakhir adalah sifatnya yang tidak terduga. Dalam praktiknya, sering kali muncul masalah-masalah yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan berada di luar cakupan rencana kebijakan yang telah disusun. Masalah semacam ini menuntut pemerintah dan pemangku kepentingan untuk bersikap tanggap, fleksibel, dan mampu merespon dengan cepat terhadap kondisi-kondisi yang berubah secara tiba-tiba.

Secara keseluruhan, memahami karakteristik masalah kebijakan ini sangat penting agar para pembuat kebijakan dapat merumuskan solusi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan. Kebijakan yang baik bukan hanya berfokus pada solusi jangka pendek, melainkan mampu mengantisipasi perubahan dan dampak yang lebih luas di masa mendatang (Suprpto et al, 2023).

Kebijakan kesehatan dapat dibedakan berdasarkan fokus dan tujuannya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu jenis utama adalah kebijakan kesehatan masyarakat, yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan secara luas di seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai inisiatif seperti perluasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, promosi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, serta peningkatan sanitasi dan kebersihan lingkungan. Tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup sehat melalui intervensi yang bersifat preventif dan promotif (Arimbi et al., 2022).

Jenis lainnya adalah kebijakan pengendalian penyakit, yang secara khusus diarahkan untuk mencegah, memantau, dan mengendalikan penyebaran penyakit, baik menular maupun tidak menular. Contohnya termasuk program imunisasi nasional, kebijakan pengendalian penyakit seperti malaria atau tuberkulosis, pengawasan epidemiologi, serta

penanganan dan respons terhadap wabah atau pandemi. Kebijakan ini penting untuk menjaga kestabilan sistem kesehatan, terutama dalam situasi darurat kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, terdapat kebijakan kesehatan reproduksi yang mencakup upaya perlindungan dan promosi kesehatan terkait sistem reproduksi. Kebijakan ini mencakup penyediaan layanan keluarga berencana, penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan, serta pencegahan penularan penyakit menular seksual. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memastikan kesehatan ibu, bayi, dan perempuan secara keseluruhan, serta mendukung hak kesehatan reproduksi setiap individu.

Kebijakan kesehatan lingkungan juga menjadi bagian penting dari sistem kesehatan. Jenis kebijakan ini bertujuan menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup demi melindungi kesehatan masyarakat. Contohnya meliputi kebijakan pengendalian polusi udara, pengelolaan limbah berbahaya dan non-berbahaya, serta pemantauan kualitas air dan sanitasi. Lingkungan yang bersih dan sehat sangat berpengaruh terhadap pencegahan penyakit, khususnya penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi kulit, atau gangguan pernapasan.

Selain dilihat dari fokus isunya, kebijakan kesehatan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatan atau level implementasinya. Di tingkat tertinggi terdapat kebijakan nasional, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur sistem kesehatan secara menyeluruh. Kebijakan ini mencakup regulasi dan pedoman nasional, alokasi pendanaan kesehatan, hingga perencanaan strategis pelayanan kesehatan skala besar. Kebijakan nasional biasanya menjadi acuan bagi semua level pemerintahan di bawahnya.

Pada level berikutnya terdapat kebijakan regional atau provinsi, yang disusun oleh pemerintah daerah tingkat provinsi untuk menangani permasalahan kesehatan yang lebih spesifik sesuai kondisi lokal. Setiap wilayah memiliki tantangan kesehatan yang berbeda, sehingga kebijakan di tingkat ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, baik dari sisi layanan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia kesehatan.

Terakhir, terdapat kebijakan lokal yang diterapkan pada tingkat kota atau kabupaten. Kebijakan ini umumnya bersifat operasional dan lebih dekat dengan masyarakat. Contohnya termasuk program kesehatan berbasis komunitas, penanggulangan penyakit lokal seperti demam berdarah, serta pengelolaan sanitasi lingkungan di permukiman padat penduduk. Kebijakan lokal penting karena berperan langsung dalam menjangkau kebutuhan riil masyarakat di akar rumput, dan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi (Betan et al., 2023).

Dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, terdapat berbagai aktor yang memainkan peran penting dengan fungsi dan pengaruh yang berbeda-beda. Pertama,

terdapat aparatur yang dipilih melalui pemilu atau elected official, yaitu para pejabat di lembaga eksekutif dan legislatif seperti presiden, menteri, anggota DPR, dan kepala daerah. Mereka memiliki kekuasaan politik dan mandat dari rakyat untuk mengambil keputusan yang memengaruhi arah kebijakan negara. Peran mereka sangat strategis karena berada di posisi pengambil keputusan tertinggi dan bertanggung jawab secara langsung kepada publik.

Kedua, terdapat aparatur yang ditunjuk atau appointed official, yaitu para birokrat atau pejabat teknis yang ditugaskan untuk membantu implementasi kebijakan. Mereka sering kali menjadi figur sentral dalam proses perumusan teknis kebijakan karena menguasai informasi administratif, data lapangan, serta proses operasional pemerintahan. Meskipun tidak memiliki kekuasaan politik seperti pejabat terpilih, peran mereka sangat vital dalam menjembatani kebijakan yang bersifat makro dengan pelaksanaannya di lapangan.

Selain aparatur pemerintahan, kelompok kepentingan atau interest groups juga turut andil dalam proses kebijakan. Kelompok ini terdiri atas organisasi profesional, asosiasi industri, LSM, atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu terhadap suatu isu. Mereka sering kali menjadi sumber informasi, tekanan politik, maupun dukungan terhadap kebijakan tertentu. Pemerintah dan politisi bahkan kerap memanfaatkan data dan opini dari kelompok ini baik untuk memperkuat posisi mereka dalam debat publik maupun untuk melemahkan argumen oposisi.

Pihak berikutnya adalah organisasi-organisasi penelitian, seperti universitas, lembaga think tank, konsultan kebijakan, dan para ahli. Mereka berperan menyediakan data, kajian ilmiah, analisis mendalam, serta rekomendasi berbasis bukti yang sangat dibutuhkan dalam proses perumusan kebijakan yang rasional dan objektif. Kontribusi mereka penting dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berdasarkan kepentingan politik semata, tetapi juga memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjangnya.

Terakhir, media massa memiliki peran strategis sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Media tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga membentuk opini, mengkritisi kebijakan, serta menjadi ruang dialog antara pemerintah dan warga. Media bisa bertindak sebagai advokat kebijakan melalui pelaporan isu-isu publik, penggalan fakta, serta memberikan ruang bagi analis dan pengamat untuk memberikan pandangannya. Dalam banyak kasus, tekanan media juga dapat mempercepat respons pemerintah terhadap isu tertentu atau memicu perubahan arah kebijakan (Suprpto et al, 2023).

Kebijakan kesehatan merupakan serangkaian keputusan, rencana, dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang kesehatan masyarakat. Urgensi

kebijakan ini semakin tinggi karena sektor kesehatan memiliki karakteristik yang sangat kompleks dan menyangkut kepentingan hidup banyak orang. Ketidakpastian kondisi sakit, luasnya cakupan masalah kesehatan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat menjadikan kebijakan kesehatan sebagai bagian penting dari kebijakan publik yang tidak dapat diabaikan (Ulfah & Nugroho, 2020).

Dalam merancang kebijakan kesehatan yang efektif, perlu memperhatikan empat elemen utama dalam segitiga kebijakan, yaitu aktor, konteks, konten, dan proses. Aktor merujuk pada individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat dan memengaruhi kebijakan. Mereka bisa berasal dari pemerintah, lembaga swasta, masyarakat sipil, atau organisasi internasional. Pengaruh yang dimiliki oleh aktor sangat bergantung pada seberapa besar kekuasaan yang mereka punya, termasuk sumber daya, otoritas, serta tingkat pengetahuan yang dimiliki. Aktor merupakan pusat dari dinamika kebijakan karena merekalah yang mendorong proses terbentuknya kebijakan berdasarkan kepentingan, pandangan, dan posisi masing-masing (Hadi, 2004).

Konteks mengacu pada lingkungan di mana aktor tersebut berada dan berinteraksi. Lingkungan ini dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, sejarah, hingga ideologi yang berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Semua elemen ini membentuk latar belakang yang akan sangat memengaruhi arah dan isi kebijakan. Suatu kebijakan yang dirancang dalam sistem politik yang stabil tentu akan berbeda dibandingkan dengan kebijakan yang disusun dalam situasi konflik atau krisis.

Konten adalah substansi atau isi dari kebijakan itu sendiri. Ia menggambarkan secara detail apa saja yang menjadi fokus kebijakan, bagaimana strategi dan langkah-langkah yang akan diambil, serta siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Konten ini merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh interaksi aktor dengan konteks yang ada, dan sering kali mencerminkan kompromi antara berbagai kepentingan.

Sementara itu, proses kebijakan mencakup tahapan-tahapan mulai dari identifikasi masalah, perumusan solusi, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses ini sangat dinamis karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang bisa berubah sewaktu-waktu. Tidak jarang pula kebijakan yang sudah dibuat harus disesuaikan kembali karena adanya perubahan dalam konteks sosial atau politik (Yuningsih, 2014).

## SIMPULAN

simpulan

Kebijakan kesehatan adalah rangkaian keputusan, perencanaan, dan tindakan yang dibuat untuk mencapai tujuan kesehatan dalam masyarakat. Kompleksitas sektor kesehatan

yang melibatkan kepentingan publik serta berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi membuat kebijakan kesehatan menjadi bagian krusial dari kebijakan publik yang perlu dirancang dan dijalankan secara komprehensif.

Dalam proses penyusunan kebijakan kesehatan, terdapat beberapa elemen utama yakni aktor, konteks, konten, dan proses. Aktor memiliki peran kunci dan dipengaruhi oleh kekuasaan serta posisi mereka dalam struktur sosial. Konteks mencakup latar belakang politik, sosial, dan budaya yang membentuk kebijakan tersebut. Konten merupakan isi kebijakan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan proses meliputi tahapan mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi pelaksanaan.

Jenis kebijakan kesehatan dapat dikelompokkan berdasarkan fokus dan tujuannya, seperti kebijakan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, kesehatan reproduksi, dan kesehatan lingkungan. Selain itu, kebijakan juga dikategorikan berdasarkan tingkat penerapannya, yaitu di tingkat nasional, regional, dan lokal, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Dalam merancang dan melaksanakan kebijakan kesehatan, terdapat berbagai tantangan yang menuntut pendekatan holistik dan kerja sama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan normatif dalam penelitian kebijakan kesehatan penting untuk menelaah dasar hukum dan norma yang menjadi landasan kebijakan serta memberikan rekomendasi agar kebijakan tersebut lebih adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kebijakan kesehatan serta peran aktor dan konteksnya sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat secara luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi, D., Fuady, A., Satrya, A., & Dewi, A. (2022). Peluang dan tantangan dalam jaminan kesehatan nasional di Indonesia: Studi kebijakan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(1), 14–27. <https://doi.org/10.22146/jkki.70231>
- Betan, A., Sofiantin, N., Nur, M. J. S., & N.L., N. S. (2023). *Kebijakan kesehatan nasional* (Issue July). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Hadi, H. (2004). Gizi lebih sebagai tantangan baru dan implikasinya terhadap kebijakan pembangunan kesehatan nasional. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 1(2), 47–53.
- Kharisma, D. B. (2018). Sistem kesehatan daerah: Isu dan tantangan bidang kesehatan di Indonesia. *Rechtvinding Online Journal*, 1–6.
- Massie, R. (2009). Kebijakan kesehatan: Proses, implementasi, analisis, dan penelitian. *Buletin*
- Copyright @ Nurhayati, Nurhayati Telaumbanua, Linda Jernih Hati Daeli, Dini Agustin, Sheika Sarah  
Khairunisa, Julian Aulia, Naila Syifaurreidha

*Penelitian Sistem Kesehatan, 12(4), 409–417.*

- Schell, S. F., Luke, D. A., Schooley, M. W., Elliott, M. B., Herbers, S. H., Mueller, N. B., & Bungler, A. C. (2013). Public health program capacity for sustainability: A new framework. *Implementation Science, 8(1), 1–9.* <https://doi.org/10.1186/1748-5908-8-15>
- Suprpto, et al. (2023). Kebijakan kesehatan. In PT Global Eksekutif Teknologi (Issue 1).
- Ulfah, I. F., & Nugroho, A. B. (2020). Menilik tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia: Faktor penyebab stunting di Kabupaten Jember. *Jurnal Sosial Politik, 6(2), 201–213.* <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12899>
- Yuningsih, R. (2014). Analisis segitiga kebijakan kesehatan dalam pembentukan undang-undang tenaga kesehatan. *Aspirasi, 5(2), 93–106.*